

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP LARANGAN BAGI MANTAN
NARAPIDANA UNTUK MENDAFTAR SEBAGAI CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL**

(Studi Pada Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

PRABOWO FEBRIYANTO

NPM. 1621020127

Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP LARANGAN BAGI MANTAN
NARAPIDANA UNTUK MENDAFTAR SEBAGAI CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL**

(Studi Pada Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

PRABOWO FEBRIYANTO

NPM. 1621020127

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

Pembimbing II : Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/ 2020 M**

ABSTRAK

Narapidana ialah orang yang melewati atau sedang berlangsung hukuman sebab sudah melanggar aturan pidana. Layaknya manusia normal narapidana pun punya hak yang selaras meski sebagian telah diambil Negara, salah satu hak nya adalah ingin mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya PP Nomor 11 Tahun 2017 terhadap larangan bagi mantan narapidana untuk mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tentu membuat resah para mantan narapidana, sedangkan di dalam Islam semua manusia adalah sama dan tidak dibeda-bedakan, yang membedakan hanyalah keimanan dimata Allah SWT, dengan adanya peraturan tersebut tentu saja bias dijadikan pembatas, dan mantan narapidana akan tidak terpenuhinya hak untuk mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, kiranya penulis dapat mengemukakan beberapa permasalahan penelitian ini sebagai berikut, yaitu Apa yang menjadi landasan Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017 terhadap mantan narapidana yang berkemauan menjadi CPNS dan Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap pelarangan bagi mantan narapidana untuk menjadi CPNS.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*Field Research*), penelitian yang menggunakan sumber-sumber hukum seperti buku, kitab, jurnal, makalah, berita terkini atau artikel. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum yaitu dengan cara penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum dan pengkajian bahan hukum dengan metode pengelolaannya yaitu di kroscek kebenaran dan keabsahannya kemudian di korelasi agar pas tidak ada kekurangan ataupun kelebihan.

Hasil penelitian ini yaitu diantaranya: *Pertama*, calon CPNS merupakan orang-orang pilihan dan harus berkelakuan baik serta tidak pernah terpidana dengan masuk bui berasaskan pada surat keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum Adanya larangan ini membuat agar masyarakat yang ingin mendaftar CPNS agar berkelakuan baik dan tidak pernah melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar calon-calon PNS nantinya memiliki citra yang baik. *Kedua*, Dalam hal penentuan kebijakan atas larangan bagi mantan narapidana untuk mendaftarkan diri menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka mereka berwajib menghormati dan menjalankan semua kebijakan dan aturan yang dibuat, Islam memandang semua manusia adalah sama dan tidak ada perbedaan, yang membadakan hanyalah iman dan taqwa di mata Allah SWT.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prabowo Febriyanto

NPM : 1621020127

Jurusan/Prodi : Siyasah/Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP LARANGAN BAGI MANTAN NARAPIDANA UNTUK MENDAFTAR SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi terhadap Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS)”**, adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Juli 2020

Penulis



Prabowo Febriyanto

1621020127



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Prabowo Febriyanto

NPM : 1621020127

Fakultas : Syariah

Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Judul : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Bagi Mantan Narapidana Untuk Mendaftar Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Irwantoni, M.Hum
NIP. 1960102119910310003


Dr. H. A. Kumedija'far, S.Ag. M.H
NIP. 197208262003121002

Ketua Jurusan


Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP LARANGAN BAGI MANTAN NARAPIDANA UNTUK MENDAFTAR SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Pada Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS)** disusun oleh **Prabowo Febrianto NPM 1621020127** Program Studi **Siyasah Syar'iyah**, telah diujikan dalam sidang **Munagasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung** pada Hari / Tanggal :

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua

:Frenki,M.Si

(.....)

Sekretaris

:Erik R. Gumiri, M.H

(.....)

Penguji I

: Marwin, S.H., M.H

(.....)

Penguji II

: Drs. H. Irwantoni, M.Hum

(.....)

Penguji III

: Dr. H. A. Kumedja Ja'far, S.Ag. M.H

(.....)

Dekan

**Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002**

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya: Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam PengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu). (QS. Al-Hujurat:13)



PERSEMBAHAN

Sembah sujudku kepada Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat Syafaatnya. Ku persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Kedua orang tua ku tercinta yang sangat aku rindukan Papaku Bambang Irawan, SH (Alm) dan Mamaku tersayang Yurhana (Almh), atas ketulusan mereka dan mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat tumbuh menjadi orang yang penuh semangat serta dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. “ *Ya Allah Ampunilah segala dosa bapak dan ibuku, limpahkan segala karunia nikmat, serta ridho-Mu*”.
2. Nenekku yang sangat aku rindukan dan aku sayangi Neng Emah (Almh), kakakku tersayang Bayu Pramono, S.ab dan teteh Dr. Kiki Rosmayanti, Omku Akhirudin, SH dan tanteku Tuti Mulyani S.ST dan semua keluarga besarku semuanya yang tidak dapat saya sebut satu persatu, terimakasih atas kesabaran, ketulusan, doa, dan bantuan yang telah kalian berikan.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Prabowo Febriyanto dilahirkan di Lubuklinggau 8 Februari 1997 yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan bapak Bambang Irawan, SH (Alm) dan Ibu Yurhana (Almh).

Pendidikan dimulai dari Tingkat Kanak-kanak (TK) Bhayangkara lulus tahun 2003. Sekolah Dasar (SD) Negeri 16 Lubuklinggau, lulus pada tahun 2009. Sekolah lanjut tingkat pertama (SLTP) di SMPN 1 Lubuklinggau, lulus pada tahun 2012. Sekolah lanjut tingkat menengah atas (SLTA) di SMAN 1 Lubuklinggau, lulus pada tahun 2015. Terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2016.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Bagi Mantan Narapidana Untuk Mendaftar Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS”**. Shalawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan Umatya. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

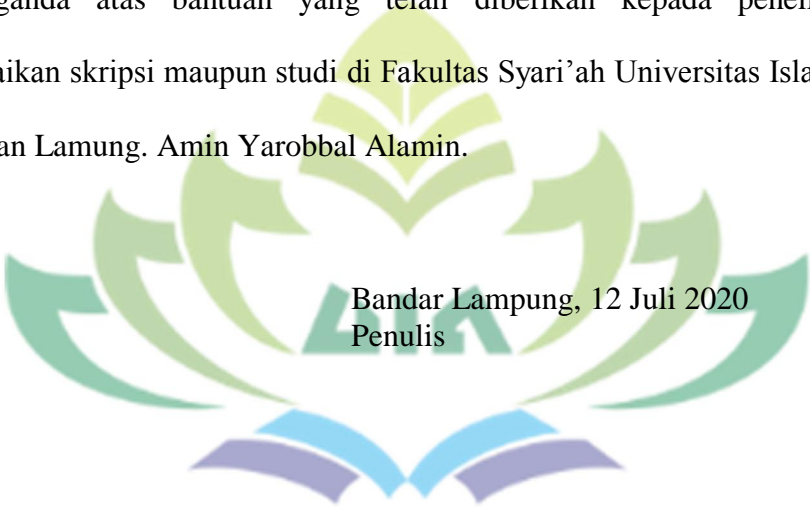
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Prof. KH. Dr. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

3. Frengki, M.Si, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I selaku Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah syar'iyah) yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Drs. H. Irwantoni, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H, selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis sejak awal perkuliahan dan banyak memotivasi serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Perpustakaan pusat dan Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
9. Sahabat sedari kecilku hingga sekarang Bagus Saputra, Saptia, Denny Herliansyah, dan teman-temanku yang lainnya.
10. Teman-teman Siyasah kelas A dan semua teman satu angkatan Siyasah 2016, terimakasih atas perjuangan dan kebersamaan selama ini.
11. Teman-teman KKN kelompok 216 yang banyak memberikan inspirasi kehidupan selama 40 hari di desa Sidorejo

12. Teman-teman UKM Ori cabang olahraga futsal yang sama-sama telah kita lewati dan meraih beberapa banyak prestasi untuk almamater ini
13. Sahabat-sahabati semua PMII terkhusus rayon Syari'ah
14. CISC Lampung, DGCi Lampung.
15. Bapak/Ibu kosan yang sangat baik selama saya di Lampung.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.



Bandar Lampung, 12 Juli 2020
Penulis

Prabowo Febriyanto
NPM 1621020127

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Manfaat Penelitian.....	10
H. Metode Penelitian	11

BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	15
1. Fiqh Siyasah Dusturiyah.....	15
a. Definisi Siyasah Dusturiyah	18
b. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah	19
2. Hak Warga Negara Untuk Mendaftar Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil	20
a. Pengertian Warga Negara	20

b. Hak-Hak Warga Negara	23
c. Tanggung Jawab Warga Negara	24
d. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia	25
3. Pengertian Mantan Narapidana.....	29
a. Pengertian Narapidana.....	29
b. Hak Politik Mantan Narapidana	31
c. Akibat Hukum Bagi Mantan Narapidana	33
B. Tinjauan Pustaka.....	35

BAB III Peraturan Pemerintah Tentang Pasal 23 Nomor 11 Tahun 2017

Tentang Manajemen PNS

A. Urgensi Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS	44
B. Aspek Kehidupan Mantan Narapidana.....	45
a. Aspek Psikologi	50
b. Aspek Fisik	52
c. Aspek Sosial	55
d. Aspek Ekonomi	58
e. Aspek Keagamaan	60
C. Hak dan Kewajiban Mantan Narapidana.....	62

BAB IV ANALISIS DATA.....

A. Urgensi Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017 Terhadap Mantan Narapidana Yang Ingin Mendaftar Sebagai CPNS	67
B. Hak Politik Warga Negara Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah	71

BAB V PENUTUP.....

A. Kesimpulan.....	75
B. Rekomendasi	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Terlebih dahulu akan dijabarkan tentang istilah dalam judul skripsi ini “**ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP LARANGAN BAGI MANTAN NARAPIDANA UNTUK MENDAFTAR SEBAGAI CPNS (Studi pasal 23 PP Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen PNS)**”. Guna menghindarkan dari salah dalam memahami makna yang terkandung didalamnya. Berikut istilah krusialnya:

Analisis ialah mencari tahu suatu kejadian guna mengetahui realitas yang nyatanya¹. Pun dijabarkan sebagai suatu primer dalam komponennya dan korelasi antar sub guna mendapatkan penguraikan yang pas dan kesegala penjuru. Rangkumannya ialah cara menggali mendetail suatu kejadian yang berlangsung guna mendapat penjelasan dan memahaminya dengan pas.

Fiqh Siyasah ialah ilmu tata negara dalam Islam yang menggali kemaslahatan manusia di bumi dan negara tempatnya

¹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1.

bernaungan. Contohnya penerapan hukum, pengaturan, dan kebijakan dari penguasa yang selaras dengan ajaran Islam. Tujuannya untuk memaslahatkan manusia dan menjauhkan dari hal yang tak bermanfaat yang bermula dari berkehidupan di dunia.²

Narapidana dalam KBBI ialah manusia yang tengah memberlangsungkan hukuman karena kesalahannya memperbuat suatu kejahatan.³ Sedang kamus induk menguraikan ialah orang buaian.⁴

PNS, ditinjau dari KBBI ‘pegawai’ ialah manusia yang bekerja dibawah naungan pemerintah (perusahaan dll). ‘negeri’ ialah negara. Rangkumannya PNS ialah manusia yg bekerja untuk pemerintahan atau negara.⁵

B. Alasan Memilih Judul

Berikut alasannya:

1. Secara Objektif

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nmr 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS bahwa mantan narapidana tidak boleh mendaftarkan diri sebagai pegawai negeri

² Mujar Ibnu syarif Dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik* (Erlangga: Jakarta, 2008),h. 11.

³ Kamus besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 22 desember 2017.

⁴ Dahlan, M.Y. Al-barry,2003. *Kamus induk istilah ilmiah seri intelektual* . surabaya Target press. H. 53

⁵ W.J.S Poerwwadarminta. 1986. Kamus besar bahasa indonesia, balai pustaka, jakarta, h. 478

sipil, dan penjabaran bagaimana penyimakan fiqih siyasah mengenai kebijakan larangan bagi mantan narapidana untuk mendaftar sebagai calon PNS.

2. Secara Subjektif

- a) Penjabaran diangkat dikarenakan sangat berkorelasi positif terhadap jurusan siyasah syariah yang penulis ampuh dan
- b) Berlimpahnya bahan data sangat mendukung penulis merampungkan skripsi ini

C. Latar Belakang Masalah

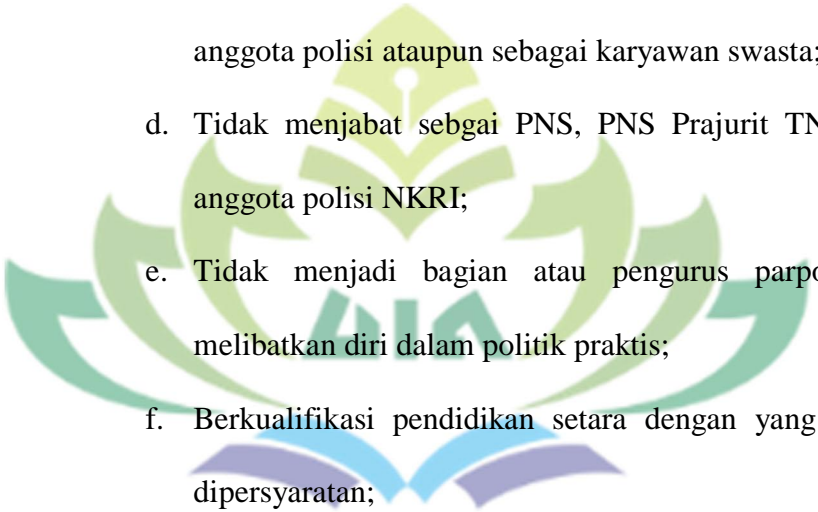
PNS ialah komponen aparatus negara yang bekerja menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kata negeri begitu krusial sebab sukses atau tidaknya pemerintahan negara tak bisa lepas dari campur tangan dari para PNS.⁶

Bila ingin menjadi PNS termaklumat dalam pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, yang bersuara:

Pasal 23

- 1) Tiap-tiap WNI berkeseepatan yang selaras untuk mengajukan diri sebagai CPNS dengan syarat yang terpenuhi, yakni:

⁶ Nurmalita Ayuningtyas Harahap. “ *Revitalisasi Menejmen Aparatur Sipil Negara Melalui Pemeberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Panorama Hukum, Vol.3. No Desember (2018) : 157

- 
- a. Minimal berumur 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat akan mengajukan diri;
 - b. Tidak pernah masuk penjara berasaskan penetapan pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap sebab melangsungkan perbuatan pidana dengan penjara dua tahun atau lebih;
 - c. Tidak pernah dipecat dengan hormat karena keinginan sendiri ataupun tidak hormat sebagai PNS, TNI, anggota polisi ataupun sebagai karyawan swasta;
 - d. Tidak menjabat sebagai PNS, PNS Prajurit TNI, atau anggota polisi NKRI;
 - e. Tidak menjadi bagian atau pengurus parpol atau melibatkan diri dalam politik praktis;
 - f. Berkualifikasi pendidikan setara dengan yang tertera dipersyaratkan;
 - g. Sehat bugar selaras dengan syarat formasi yang dipilih menjadi CPNS;
 - h. Mau ditempatkan di seluruh wilayah NKRI selaras dengan tempat saat ia mendaftarkan diri;
 - i. Syarat lainnya selaras dengan keperluan formasinya yang diatur oleh PPK.

- 2) Batas usia bisa dipalingkan oleh jabatan tertentu, yakni maksimal berusia 40 tahun.
- 3) Jabatan tertentu yang disebutkan di ayat 2 diterapkan oleh presiden.

Narapidana ialah manusia yang berbuat kesalahan dengan melanggar norma hukum jadi diberi hukuman pidana oleh hakim yang bertugas saat persidangan. Rumor yang berkembangbiak dengan subur ditengan khalayak umum ialah kurang baiknya penerimaan untuk hidup berdampingan lagi bagi narapidana yang telah keluar dari bui.

Warga menguraikan bahwa orang itu tidak akan bertobat dan akan mengulangi kesalahan yang sama selamanya. Menurutny lagi orang yang telah masuk bui akan berkemungkinan besar akan menjadi residivis selamanya dan sangat membahayakan.

Jadi rangkumannya bahwa narapidana yang telah selesai masa hukuman dan keluar dari bui akan kehilangan status sosialnya atau akan terinjak-injak norma sosialnya dimata masyarakat atau akan didiskriminasi di lingkungannya sendiri, dan utamanya akan terkucilkan.⁷

⁷ ZainulAkhyar, HarpaniMatnuh, Muhammad Najibuddin. “Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa Jenua Benungah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah”. JurnalPendidikanKewarganegaraan: Volume 4, Nomor 7, Mei 2014. h.546

Teorinya, kedudukan akan diisi praktis ialah objek dari ilmu politik. Komponen praktisnya ialah hukum tata negara. Kajian dalam skripsi ini ialah pembelajaran mengenai hukum tata negara. Selaras dengan ungkapan Miriam Budiarjo: politik biasa ialah semua aktivitas yang berkorelasi dengan 1) negara; 2) kekuatan; 3) mengambil putusan; 4) bijaksannya; 5) pengalokasian⁸.

Berlandaskan pada pengertian itu, maka politik ialah keseluruhan hal yang bersangkutan dengan politik yang diikuti oleh warga negara untuk memenuhi keperluannya sebagai warga masyarakat suatu negara.

Perlindungan HAM telah diakui oleh Indonesia sejak konstitusi pertama yakni UUD 1945 lewat pasal 27 ayat 1 berbunyi *‘segala warga negara Indonesia selaras derajatnya dalam pandangan hukum dan pemerintahan dan wajib mendukungnya dengan tanpa pengecualian.’*⁹

Lalu amandemen UUD 1945 pun dimaklumkan dalam pasal 28 berbunyi:

*“kemerdekaan berkumpul dan berikatan, menyampaikan pendapat lisan atau tulisan dan lainnya selaras dengan penetapan UU.”*¹⁰ dan pasal 28D ayat 3 menjabarkan *“tiap-tiap warga negara Indonesia mendapatkan peluang yang seimbang dalam pemerintahan.”*

⁸ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1998), h.8.

⁹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (1).

¹⁰ *Ibid* Pasal 28.

Dari berbagai hak politik, hak paling bungsu ialah untuk duduk dan dijabatkan dalam publik dalaam pemerintahan ialah hak yang krusial untuk menjamin masyarakat bisa ikut serta dalam demokrasi. Masyarakat begitu antusias menyambut dengan hangat transformasinya negara menjadi sebuah negara yang menganut asas demokrasi.

Landasannya bahwa selagi individu tersebut memenuhi syarat yang dibuat dalam peraturan perundang-undangan, maka terciptalah dan ada hak yang sebanding serta seimbang untuk duduk dan menjabat dalam kedudukan public. Tapi apakah keseluruhan komponen WNI berpeluang untuk turut serta meramaikan, tentu seluruh warga berhak ikut turut serta dalam pesta pemilihan CPNS ini. Pun demikian dengan bekas narapidana bisa terlibat dan ada hak yang ia punya untuk jabatan public tersebut.

Kasus politik khusus bekas narapidana diatur dalam perundang-undang sangat dibatasi. Contoh dibatasinya yakni kedudukannya menjadi kepala daerah bisa dilihat dalam UU Nomor 32 tahun 2003 direvisi menjadi UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah yang bersuara bahwa : pembatasan ditujukan untuk narapidana atas kejahatan dengan hukuman 5 tahun penjara

melalui putusan pengadilan yang ber hukum konstan dan kuat tak mudah digoyahkan.

Putusan lain dapat ditemukan didalam Pasal 58 f UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemda yang mengutarakan :

“Calon kepada daerah dan wakilnya ialah WNI dengan syarat: ... (f) tak pernah menjadi terpidana bui berdasarkan putusan pengadilan yang berkuatan hukum kuat dan konstan sebab musabab melangsungkan tindak kejahatan dan diberi ganjaran hukuman minimal lima tahun penjara atau lebih.”

Menyebarkan luasnya aturan itu dikaji dan digali mendalam dalam Mahkamah konstitusi dan ditetapkan dengan bersyarat berarti ada batasan hak mantan narapidana untuk meyalonkan diri sebagai pimpinan daerah, tetapi ada syarat kekhususnya yakni termaklumat dalam ketetapan MK itu.

Fiqih siyasah memberi gelas konstitusi sebagai dusturi. Yang bermula dari bahasa persia dan disisipkan dalam bahasa Arab yang berarti asas. Rangkumannya dustur ialah seperangkat kaidah yang mengatur pondasi dan korelasi kerjasama antar sesama anggota warganya dalam sebuah negara, baik tak tertulis ataupun yang tertulis dengan pasti dan jelas serta lengkap, baik secara menyiratkan makna mendalam.

Siyasah *dusturiyyah* adalah fiqih menggali kasus perundang-undangan negara. Komponen yang dikaji secara mendetail rinci

ialah konsep konstitusi (UUD dan asal mula terlahirnya aturan itu), legislasi (merumuskannya), lembaga dan syura ialah tiang krusial dalam perpu tersebut.

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝

Artinya: “*Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (Mekah)*”

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batas ruang dalam pembangunan penelitian agar penelitian yang dilakukan tidak sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengemngan pembahasan. Dengan demikian yang menjadi focus penelitian ini adalah mengenai Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Bagi Mantan Narapidana Untuk Mendaftar Sebagai CPNS (Studi Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS).

E. Rumusan Masalah

Berikut rumusannya:

1. Apa yang menjadi landasan Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017 terhadap mantan narapidana yang berkemauan menjadi CPNS?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelarangan bagi mantan narapidana untuk menjadi CPNS?

F. Tujuan Penelitian

Untuk mencapai suatu titik akhir maka perlulah sebuah tujuan yang kokoh, maka tujuan riset ini ialah:

1. Mengetahui kebijakan pemerintah yang termaklumat dalam PP RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS
2. Untuk menganalisis Fiqh Siyasah terhadap kebijakan pemerintah terhadap larangan bagi mantan narapidana untuk mendaftar sebagai calon PNS.

G. Signifikasi Penelitian

Signifikansi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Riset ini bisa menginformasikan hasana berkembangnya Ilmu pengetahuan hukum tata negara.
- b. Menyumbangsikan pengetahuan mengenai hukum islam di lingkungan akademik perguruan tinggi dan sumbangsih untuk kepustakawanan ilmu tata negara.
- c. Meningkatkan referensi literature supaya lebih paham akan syarat menjadi calon pegawai negeri sipil.

H. Metode penelitian

Metode penelitian ialah sebuah cara untuk mendapatkan data krusial guna penyusunan kajian.¹¹

1. Jenis Penelitian

Riset ini berjenis kepustakaan, yakni riset yang diaplikasikan dengan pengumpulan data dan info dengan perantara bahan-bahan yang tersedia di perpustakaan, baik online maupun offline¹².

Dalam hal ini, penulis mengadakan riset dengan membaca dan menggali serta mengkaji pemahaman dari segala bentuk literature yang berkorelasi positif dengan kajian dan bahasan dalam karya ini.

2. Sifat Penelitian

Riset ini bersifat deskriptif yakni metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan menguraikan realitas, faktual, dan kisah nyata yang ada. Dalam prosesnya berlangkahkan apa yang sedang terjadi saat itu dan dampak yang terjadi dari kejadian tersebut.

¹¹ Prof. Dr. Sugiono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D, Cet ke 26, (Bandung : Alfabeta CV 2017), h. 2

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004), hlm. 127.

Penulis akan mejabarkan larangan mantan narapidana untuk menjadi CPNS ynag berasaskan pada pasal 23 PP Nomor 11 tahun 2007 tentang menejemen PNS Lalu dikaitkan pada Fiqh Siyasah.

3. Sumber Data

Sesuai jenis penelitian yaitu *Library Reseach* maka data yang dipergunakan yaitu:

a. Data Primer

Ialah data pokok utama yang berasal mula dari sumber aslinya dan dengan data yang sebenar-benarnya tanpa ada manipulasi. Riset ini bersumber primer yakni segala sesuatu hak yang berkaitan dengan pasal 23 PP nomor 11 tahun 2017 tentang menejmen PNS, Al-Qur'an dan Hadist.

b. Data Sekunder

Ialah asal muasal data yang kedua setelah yang pokok dan bermula dari perpustakaan, jurnal, kajian terdahulu, riset yang relevan, buku-buku, dan teori-teori Fiqh Siyasah.

c. Data Tersier

Ialah yang mendorong data kedua, diambil dari sumber lain yang berkorelasi positif dengan riset ini dan bisa dipertanggung jawabkan keabsahannya. Misalnya Internet, Jurnal, Ensiklopedia, dll.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data dilandaskan pada metode risetnya yakni mengidentifikasi secara teratur dan tertib apa yang ditemukan dan menganalisis file yang terdapat informasi krusial yang berkaitan dengan kasus riset.¹³ Data yang dikumpulkan menjadi satu kesatuan dalam sebuah map atau catan harian, meliputi dokumenn, majalah, dan lainnya.

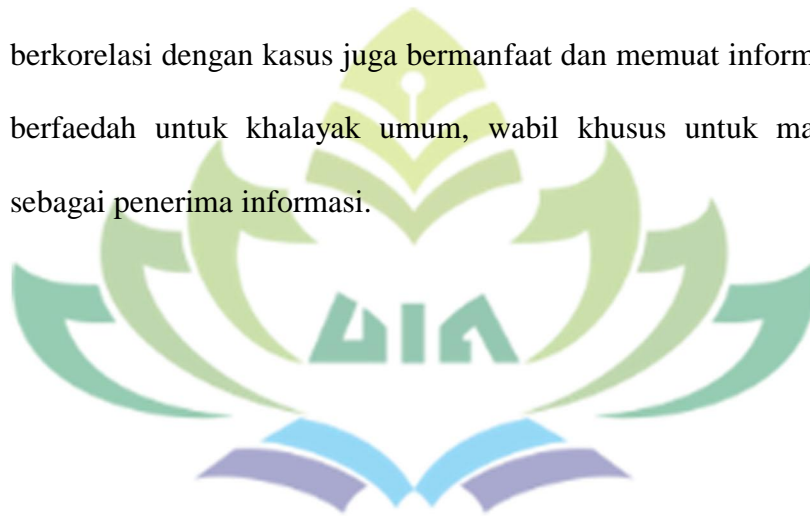
5. Metode Pengolahan Data

Data telah terkumpul selanjutnya wajib diolah dan dikroscek kebenarannya serta keabsahannya, yang telah dikumpulkan lewat studi pustaka di atas. File harus berkorelasi positif dengan kasus, tidak ada yang berlebihan juga tidak kekurangan sehingga menyulitkan dalam memahami serta membuat sebuah bahasan dan juga rangkuman dari riset ini.

¹³ Consuelo G Sevilla (dkk), *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet.I, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm.37

6. Metode Analisis Data

Analisis data memakai analisis isi yang bersifat membahas secara mendalam dan mendetail rinci terhadap isi informasi baik tertulis atau tercetak dalam media elektronik. Metode ini sepemikiran dengan imam al-mawardi tentang Proses Pengangkatan Kepala Negara, (Content Analysis). Penulis bisa menganalisis melalui bentuk apapun. Contoh surat kabar, koran, radio atau pun dokumentasi lainnya yang berkorelasi dengan kasus juga bermanfaat dan memuat informasi yang berfaedah untuk khalayak umum, wabil khusus untuk masyarakat sebagai penerima informasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah ialah komponen fiqh siyasah yang mengkaji secara mendalam pekasusan dalam perundang-undangan negara. Yang dikaji dalam bahasan itu ialah konsep konstitusi (UUD), legislasi (langkah merumuskan UU), lembaga demokrasi dan syura yang krusial untuk tersaji dalam hukum Islam. Juga menggali dengan detail konsep negara hukum dalam tatanan negara dan korelasi berbalik arah antara pemerintahan dan warga negara yang mestinya dinaungi olehnya.¹⁴

Muhammad Anis Qasim Ja'far menerangkan hak politik:¹⁵

- a) Hak mengutarakan gagasan dalam pemilihan dan referendum;
- b) Menyalonkan diri menjadi bagian anggota perwakilan rakyat setempat; dan
- c) Menyalonkan diri menjadi presiden dan lainnya yang mengandung perselisihan dan menyatakan pendapat ide gagasan.

¹⁴ Nurcholis Madid, *fiqh siyasah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.177

¹⁵ Mujar Ibnu Syarif, *Hak-hak Politik Minoritas Nonmuslim dalam Komunitas Islam: Tinjauan dari Perspektif Politik Islam*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 2003), cet. I, h. 67

Ketiga hal itu, tak bisa diterapkan kecuali orang yang terpenuhinya syarat selain status warga negara. Individu bisa memakai atau tidak hak politiknya tanpa diikat oleh apapun juga.¹⁶ A. M Saefuddin menyatakan tiap manusia berhak dalam politik yakni memilih, hak musyawarah, mengawasi, memecatan, menyalon dalam pemilu dan duduk dalam jabatann negaranya sendiri.¹⁷

Menurut Al-Maududi paling tidak terdapat 6 hak politik dalam islam yakni:¹⁸

- 1) Bebas mengutarakan gagasan dan berkeyakinan, bisa berupa memberi kritik penguasa¹⁹.
- 2) Bebas berkumpul dan berikatan dengan sembarang orang.
- 3) Berhak memilih dan dipilih sebagai kepala negara, ketua dan bagian dari DPR
- 4) Memberikan bunyi pada pemilu yang nantinya akan digelar selama beberapa tahun sekali.

وَمَا أَخْلَقْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ١٠

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ A. M. Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, h. 17-19

¹⁸ Ibnu Syarif, *Hak-hak Politik Minoritas Non-Muslim dalam komunitas Islam*, h. 52

¹⁹ Abu A'la Madudi, *Islamic Law and Constitution*, (Lahore, Pakistan: Islamic Publication Ltd, 1997) h. 283

Artinya:

“Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah. (Yang mempunyai sifat-sifat demikian) itulah Allah Tuhanku. Kepada-Nya lah aku bertawakkal dan kepada-Nya-lah aku kembali”

Kajian yang menggali bahasan tentang hak politik diutarakan oleh Abu A’la al-Madudi dan mengkaji persamaan penyetaraan dan bedanya dalam mengelompokkan bagian hak politik umat Islam, yakni:²⁰

- 1) Memilih dan dipilih menjadi ketua negara
- 2) Hak menyatakan ide gagasan dan ikut serta dalam musyawarah guna mnggapai mufakat
- 3) Mengendalikan dan membenarkan hak yang salah bila dilakukan oleh penguasa
- 4) Memberhentikan kepala negara bila tak bisa memberlangsungkan tugas selaras dengan amanah rakyat untuk masa depannya.
- 5) Menyalonkan diri menjadi presiden
- 6) Menjabat dalam pemerintahan ialah hak setiap warga yang bernaung dalam suatu negara.

²⁰ Abd al- Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan dalm Pandangan Islam*, h. 17-52

a. Definisi Dusturiyah

Dusturiyah merupakan bagian bidang dalam ilmu *siyasah* yang membahas mengenai ketentuan peraturan dalam bernegara. Mengenai konsep dusturiyah terdapat pembahasan mengenai bidang-bidang pembahasannya antara lain yaitu konsep konstitusi (UUD negara), legislasi (perumusan undang-undang), demokrasi dan syura.²¹

Kasus mengenai *fiqh siyasah* ialah korelasi positif pimpinan salah dengan rakyat dan juga organisasi masyarakat yang pada konsepnya untuk dapat merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya.²²

Setelah mengalami penyerapan ke dalam sastra Arab, kata *dusturiyah* berkembang menjadi suatu asas, dasar, serta pembinaan, yang menurut istilah dapat diartikan suatu kaidah yang mengatur suatu hubungan kerja antar sesama anggota masyarakat terhadap suatu rencana rancangan terhadap tujuan di dalam sebuah negara atau dalam serapan bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berdasarkan undang-undang dasar dari suatu negara.²³

²¹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177.

²² H. Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47.

²³ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,, h. 177-178.

b. Ruang Lingkup Kajian *Dusturiyah*

Kajian mengenai ruang lingkup dalam *siyasah dusturiyah* yang secara umum dapat disimpulkan antaranya:²⁴

- a. Perkasusan pemerintaham dan kewajiban
- b. Perkasusan rakyat mengenai status dan haknya
- c. *Ba'iat*
- d. *Waliyul Ahdi*
- e. Perwakilan
- f. *Wizarah* serta perbandingannya.

Sehingga apabila jika ditinjau *siyasah dusturiyah* dapat dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya:

- a. *Siyasah Tasyri'iyah* yang mana siyasah ini termasuk di dalamnya mencakup perkasusan rakyat, korelasi muslim dan non-muslin, UUD, dan lainnya.
- b. *tanfidhiyah* yaitu termasuk yang di dalamnya pembahasan soal *wuzarah, wali al-ahdi*, dan lainnya.
- c. *Qadha'iyah* yaitu di mana pembahasan mengenai permasalahan peradilan.
- d. *Idariyah* yaitu mengenai pembahasan administrasi dan kepegawaian.²⁵

²⁴ H. Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*,, h. 47.

Sehingga atas pembagian mengenai siyasah dusturiyah dapat disimpulkan bahwa siyasah ini merupakan segala aspek yang mengatur pemerintahan di dalam suatu negara mulai dari perancangan suatu ketetapan atas suatu dasar negara hingga berbagai ke-administrasi yang berasaskan pada tuntutan dan tuntunan yang selaras dengan syariat Islam .

2. Hak Warga Negara Untuk Mendaftar Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil

a. Pengertian Warga Negara

Salah satu syarat berdirinya suatu Negara adalah adanya rakyat atau penduduk yang tinggal di suatu wilayah tertentu. Rakyat yang tinggal dan penduduk di suatu wilayah tertentu dalam hubungannya dengan Negara disebut warga Negara. Warga Negara mempunyai kewajiban terhadap Negara, dan sekaligus juga mempunyai hak yang wajib di berikan dan di lindungi oleh Negara.²⁶

Dalam undang undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, bab X tentang warga Negara dan penduduk pasal 26 ayat 1 berbunyi”yang menjandi warga Negara ialah orang orang

²⁵ *Ibid*, h. 48.

²⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaliy Ibrahim, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum dan Sinar Bakti, 1976), h. 291

bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara". Sedangkan dalam Ayat 2 penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian Ayat 3 "hal-hal mengenai warga Negara dan penduduk diatur dalam undang-undang.

Sementara dalam Pasal Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 yang dimaksud dengan warga Negara Indonesia adalah:

- Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah republik Indonesia dengan Negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga Negara Indonesia.
- Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia.
- Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara Indonesia dan ibu warga Negara asing.
- Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum Negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.

- Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga Negara Indonesia.
- Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia.
- Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.
- Anak yang lahir di wilayah Negara republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
- Anak yang lahir di wilayah Negara republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaanya.
- Anak yang dilahirkan di luar wilayah Negara republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari Negara tempat anak tersebut

dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.

- Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.²⁷

b. Hak-Hak Warga Negara

Sebagai seorang warga Negara, setiap orang berhak untuk:

1. Hak asasi pribadi (*personal right*) yang meliputi kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya.
2. Hak ekonomi (*property right*) yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya serta memanfaatkannya.
3. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) atau *right of legal quality*.
4. Hak politik (*political right*) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak mendirikan partai politik dan sebagainya.

²⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Pasal 4.

5. Hak sosial dan kebudayaan (*social and cultural right*) misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
6. Hak untuk mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural right*) misalnya peraturan dalam penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.²⁸

c. Tanggung Jawab Warga Negara

Tanggung jawab (*responsibility*) dimaksudkan sebagai tanggung jawab atas pelaksanaan hak sebagai warga Negara. Tanggung jawab dalam melaksanakan hak-kewajibannya, disamping untuk kepentingan dirinya, juga diarahkan kepada pencapaian kehidupan yang baik yang telah disepakati dalam kehidupan bernegara. Dengan cara demikian maka tidak akan melanggar hak asasi orang lain.²⁹ Dalam kaitannya dengan lingkungan politik dimana merupakan lingkungan yang demokratis, manusia menjadi citizen, yaitu warga yang secara bebas melibatkan diri dalam proses pembuatan keputusan, idealnya manusia yang secara politik aktif, serta bekerja sama

²⁸ Cholisin, *Ilmu Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h. 52

²⁹ *Ibid*, h. 52

dengan sesame warga Negara untuk secara kolektif menentukan masa depan.³⁰

d. Asal muasal HAM

Asal muasal HAM di dunia dimulai dari tulisan filsuf abad ke 17, seperti John Locke, 20 tahun kemudian muncul deklarasi Universal diuraikan dalam kesepakatan Internasional yakni Konvenan Internasional hak sipil dan KI hak ekonomi, sosial, dan budaya (1966).³¹

Lalu dimulai musyawarah PBB tentang HAM yang memproduksi piagam krusial yakni deklarasi Universal HAM oleh PBB dalam sidang terbuka di Istana Chaillot, Paris. Berikut isi krusial dari piagam itu yang perlu diketahui oleh masyarakat pada umumnya:

1. Mempunyai hak berpendapat dan menyampaikan ide gagasan dalam benaknya
2. Hak untuk berkumpul tanpa hambatan dari pihak manapun juga.
3. Hak turut ikut serta dalam jabatan pemerintahan negara tempat ia tinggal.
4. Hak untuk turut serta dalam pemilu secara luberjurdil dan tertutup tanpa paksaan.

³⁰ *Ibid*, h. 52

³¹ Miriam Budiarto, *Op.Cit.* h. 212

Hak politik yang diperkokoh dalam tulisan tersebut seperti kurang optimal dan kurang melindungi warga sipil dari sikap otoriter negaranya, lalu langkah kedua yang dihadapi oleh PBB ialah merancang suatu hal yang lebih maksimal pengikatannya yakni 2 Konvenan Internasional hak sipil dan politik dan KI hak ekonomi sosial budaya.

Sepuluh tahun berlalu dan muncullah *Internasional Conventanton Civil and Political Right* berlaku setelah di validasi oleh 35 komponen PBB. Berikut rumusan hak politiknya yang kudu dipelajari dan menjadi referensi baru bagi warga negara pada awamnya:

1. Hak bebas menentukan status politik
2. Hak untuk berkumpul secara tenang.
3. Hak bebas mengutarakan argumen dan tergabung dalam oragnisasi perserikatan
4. Hak ikut serta dalam pemilu, dipilih dan memilih sebgai pejabat negara yang bersangkutan.

Naskah deklarasi universal HA, 2 komponen dan perjanjian sebagai penyatuan itu disebut UU Internasional HAM.³² Dari dulu hingga sekarang kita mengenal tiga zaman HAM, yakni:

- a) Hak sipil dan politik yang sudah awam dikenal dan dicapkan dengan argumen belahan dunia barat.
- b) Zaman kedua, ialah hak ekonomi, sosial dan budaya yang semarak diperjuangkan oleh negara komunis, dan
- c) Era ketiga yakni hak damai dan atas pembangunan yang digencarkan oleh negara ketiga.

Ada negara non barat yang tergerak hati nuraninya untuk mengkaji komponen yang kurang optimal menarik perhatian khalayak ramai:

- a) tiap manusia punya kewajiban dan tanggung jawab terhadap manusia lainnya selaras dengan ia berada.
- b) Negara yang religiunya kuat, HAM disebut sebagai bagian tak terelakkan dari agama dan budaya.

Akhir kata pada tahun 1993 170 negara komponen PBB (indonesia pun ikut) merancang Vienna Declaration yang membantu mendirikan negara barat dan non-barat utamanya misal dalma bangkok

³² Miriam Budiarto, *Op.Cit.* h. 218

Declaration.³³ Dalam diskusi PBB ada ketidaksamaan hak politik antar negara sebab ada yang berasaskan pada liberal abad 17 dan 18. Hak ekonomi berpacu pada tingginya Negara barat mengungkapkan keambiguan bahwa hak ekonomi diutamakan sebab sebab untuk mengurangi rasa peduli terhadap hak politik.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Pada pondasi sejatinya hak politik diperuntukkan untuk perlindungan terhadap kekeliruan dalam penugasan para penguasa, karena hal itu banyak sedikitnya mengganggu kenyamanan manusia di dunia ini. Hal itu untuk menyelaraskan realitas antara janji dan kenyataan yang terjadi.

Dalam pelaksanaannya hak politik pemerintah wajib dibatasi wewenangnya oleh perundang-undangan karena kalau tidak maka

³³ *Ibid*, h. 213

akan mengganggu ketentraman umat manusia. Bila bebas maka tidak akan ada yang akan mengawasi pemerintahan. Penguasa akan bertindak tanduk selaras keinginannya sendiri tanpa memikirkan masyarakat.

Hal itu sangatlah berbahaya bagi kelangsungan hidup warga di suatu negara. Maka dari itu digagaslah sebuah batasan yang termaklumat dalam sebuah konstitusi dengan pondasi berpayung hukum yang begitu kuat dan kokoh. Supaya hal buruk tidak menimpa masyarakat dunia.

3. Hak Politik Mantan Narapidana Menjadi Anggota PNS

a. Pengertian Narapidana

Narapidana dalam KBBI ialah orang yang melewati atau sedang berlangsung hukuman sebab sudah melanggar aturan pidana.³⁴ Kamus induk mengutarakan ialah orang buaian.³⁵ dalam KUHP pasal 1 angka 32, terpidana ialah individu yang dipidana atas penetapan SK pengadilan sebagai lembaga berkuatan hukum yang konstan tanpa berubah-ubah.

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id> Diakses pada 22 Desember 2017.

³⁵ Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. *Kamus Induk Istilah Seri Intellectual*. Surabaya. Target Press. Hlm 53.

Pasal 1 Ayat 7 UU nomor 12 tahun 1995 menerangkan bahwa terpidana yang berlangsung masa hukumannya maka hilang sudah rasa merdekanya di dalam LP. Pasal 1 Ayat 6 dalam UU yang sama, terpidana ialah manusia yang dihukum berasaskan pada putusan pengadilan yang berhukum legal sebab tidak tanduk kejahatan yang ia perbuat di masa lalunya.

Sebelum marak kata narapidana yang awam dipakai ialah orang penajara. Dalam Pasal 4 Ayat 1 Gestichenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 dijabarkan dengan jelas bahwa orang terpenjara ialah:³⁶

- a. Orang yang terperangkap dalam bui karena suatu kasus dimana orang tersebut dalam keadaan tertangkap.;
- b. Individu yang ditahan tapi tidak selamanya;
- c. Orang dalam bui;
- d. Orang-orang yang tak menjalankan hukuman tapi masuk bui dengan legal sebab musabab perbuatan tabiatnya yang negatif dan merugikan manusia lain.

³⁶ Wahdanigsi. 2015 *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*. Hasil penelitian Mahasiwa Universitas Hasanudin. Makasar.

b. Hak Politik Mantan Narapidana

Narapidana masih memiliki kewajiban dan juga hak. Dalam KBBI hak ialah kewenangan dan kepemilikan yang dimiliki manusia dan makhluk hidup lainnya dan hanya unya diri sendiri, orang lain pun punya tapi berbeda-beda.³⁷

Layaknya manusia normal narapidana pun punya hak yang selaras meski sebagian telah diambil negara. Berasaskan pada PBB ada minimal perbuatan narapidana yang tengah dihukum berikut hak hak dari narapidanan:³⁸

1. Ada buku
2. Narapidanan dikelompokkan
3. Punya ventilasi udara
4. Adanya sanitasi yang cukup
5. Memperoleh air bersih
6. Pakaian dan tempat tidur yang daya guna
7. Makanan yang sehat
8. Hak berolahraga
9. Adanya layanan dokter umum dan gigi

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Hak*. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada tanggal 21 Januari 2020

³⁸ Panjaitan dan Simorangkir, *Lapas Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 74

10. Hak membela diri bila ada yang tidak adil dan tidak semena-mena oleh orang lain
11. Jaket dan borgol
12. Tak boleh bersel gelap dan diberi hukuman tubuh
13. Tahu informasi diluaran sanan untuk medapat info atau data yang valid
14. Berinteraksi dengan dunia luar
15. Mendapat bahan literatur seperi buku ataupun hal lain yang bersifat mendidik kearah yang positif
16. Mendapat layanan agama
17. Jaminan menyimpan barang pribadi
18. Diberitahukan dari keluarga yang bersangkutan bila ada yang meninggal aataupun sakit.

Hak narapidana juga telah dijabarkan dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yakni:

1. Beribadah
2. Memperoleh perawatan
3. Memperoleh pendidikan
4. Mendapat layanan kesehatan

5. Mengutarakan keluhan kesah
6. Membaca dari media masa atau cetak
7. Dapat premi karena sdh bekerja
8. Boleh dikunjungi oleh keluarga, kuasa hukum dll.
9. Memperoleh pengurangan masa hukuman
10. Berkesempatan untuk cuti
11. Pembebasan dengan syarat
12. Memperoleh cuti sebelum bebas
13. Dan hak lainnya

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

Artinya:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S Al-Hujarat: 9).

c. Akibat Hukum Bagi Mantan Narapidana

Mantan narapidanan yang sudah selesai masa kurungannya awamnya merasa menyesal atas perbuatannya di masa lalu, dan berkeinginan memperbaiki keadaan dan menebus dosanya serta

mengawali hidup yang baru dengan lebih baik. Awamnya pula lebih dekat dengan sang maha kuasa karena adanya pembekalan agama di dalam bui. Lebih rajin beribadah, juga menjalankan perintahnya, dan menjauhi segala larangannya.

Mereka pun ingin sekali ikut serta dalam ranah sosial supaya statusnya diselaraskan dengan komponen masyarakat lainnya. Tapi diskriminasi masih saja akan mereka terima jadi tidak mudah untuk mereka memperoleh pekerjaan yang baik. Mereka tidak diterima padahal masih dalam upaya meninggikan derajat dimata soasial masyarakat.

Dampak dari diskriminasi dan penolakan yang terus berkelanjutan akan membuat narapidanan kembali mengulang perbuatan kejinya, lalu akan masuk penjara kembali dan akhirnya tercetuslah istilah residivis yang melekat dengan jati dirinya yang tak mudah disembuhkan.

Karena itu narapidana merasa di atas ombak kesana kemari tidak menentu arah kehidupan ke depannya apakah akan menjadi residivis atau melanjutkan hidup baru tetapi dengan resiko di diskriminasi dan diolok-olok oleh warga masyarakat disekitaran rumahnya ataupun yang mengenalnya. Hal ini sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S Al-Hujarat: 11)

c. Tinjauan Pustaka

Berikut riset terdahulu yang berkesinambungan dengan riset ini untuk membandingkan hasil apakah berkorelasi dan berkeselarasan atau tidak:

1. Penelitian/skripsi yang dilakukan oleh Gugum Rido Putra berjudul “Hak Mantan Narapidana Untuk Dipilih Dalam pemilu Kepala Daerah”, riset ini dengan peneliti ialah sama-sama meneliti tentang mantan narapidana, perbedaanya adalah gugum tidak menggunakan

fiqh siyasah sedangkan peneliti menggunakan fiqh siyasah untuk melihat perspektif Islamnya.

2. Penelitian/skripsi yang dilakukan oleh Fahrul Rinaldi dengan judul “Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Anggota Legislatif Perspektif HAM dan Fiqh Siyasah (Putusan MA No. 46 P/HUM/2018)” menjadi perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Fahrul dan peneliti, yaitu sama-sama meneliti tentang mantan narapidana dan menggunakan konsep fiqh siyasah sedangkan perbedaannya adalah peneliti meneliti mantan narapidana yang dilarang mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil sedangkan Fahrul meneliti pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai anggota legislatif.
3. Penelitian/skripsi yang dilakukan oleh Chasanatun Fadhillah dengan judul Larangan Pegawai Negeri Sipil Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pemilu dan Pemilukada (Studi Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014). Riset ini adalah sama-sama meneliti tentang larangan bagi mantan narapidana,

peneliti meneliti larangan mantan narapidana untuk mendaftar CPNS,
sedangkan Chasanatun meneliti tentang larangan bagi mantan
narapidana untuk mencalonkan diri dalam pemilu dan pilukada.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

A'la Madudi, Abu, *Islamic Law and Constitution*, (Lahore, Pakistan: Islamic Publication Ltd, 1997).

Al-barry,Dahlan, M.Y. *Kamus induk istilah ilmiah seri intelektual* . surabaya Target press.2003.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007).

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1998)

Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. *Kamus Induk Istilah Seri Intelectual*. Surabaya. Target Press.

Dahlan, M.Y. Al-barry,2003. *Kamus induk istilah ilmiah seri intelektual* . surabaya Target press.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2011.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: GramediaPustaka Utama,2011).

Djazuli, H. Ahmad, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam*
Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).

G Sevilla, Consuelo, (dkk), *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet.I, Jakarta: UI
Press, 1993.

Ibnu syarif, Muzar, Dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran*
Ilmu Politik (Erlangga: Jakarta, 2008).

Iqbal, Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana,
2014).

Kamus besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 22
desember 2017.

Madid, Nurcholis, *fiqh siyasah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Mufid, Moh., *Politik Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Jakarta Press, 2010).

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditia
Bakti, 2004.

Panjaitan dan Simorangkir, *Lapas Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*,
(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).

Poerwwadarminta, W.J.S, *Kamus besar bahasa indonesia*, balai pustaka, Jakarta, 1986.

Rasyid, Abdul, *IlmuPolitik Islam*, (Bandung: Pustaka, 2001).

Saefuddin, A. M , *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

Saefuddin, A. M., *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*.

Salim, Abd.Muin, *FiqhSiyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1995).

Sofyan, Ayi, *EtikaPolitik Islam*, (Bandung: PustakaSetia, 2012).

Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Cetke 26, Bandung : Alfabeta CV 2017.

Syarif, Mular Ibnu, Dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*(Erlangga: Jakarta, 2008).

Syarif, Mular Ibnu, *Hak-hak Politik Minoritas Nonmuslim dalam Komunitas Islam: Tinjauan dari Perspektif Politik Islam*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 2003), cet. I.

Zaidan, Abd al- Karim, *Masalah Kenegaraan dalm Pandangan Islam*.

Jurnal

Akhyar, Zainul Harpani Matnuh, Muhammad Najibuddin. “Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa Jenua Benungah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*: Volume 4, Nomor 7, Mei 2014.

Harahap, Nurmalita Ayuningtyas,. “ Revitalisasi Menejmen Aparatur Sipil Negara Melalui Pemeberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.3. No Desember (2018)

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun.2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pasal 1

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (1).

Naskah Ilmiah

Wahdanigsi. 2015 *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*. Hasil penelitian Mahasiswa Universitas Hasanudin. Makasar.